

PENGEMBANGAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING SESUAI PERBUP NO 89 TAHUN 2021 DI SIDOARJO

Cintya Hanum Pramudita¹, Yusuf Hariyoko², Eddy Wahyudi³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

Cintyahanumza10@gmail.com¹, Yusufhari@untag-sby.ac.id², Eddyahyudi@untag-sby.ac.id³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRACT

This research is to explain the instruments used by the Sidoarjo Regency Government in accordance with Perbup No. 89 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting with Integrity and identify 3 indicators, namely Legal Instruments, Institutional Order and Operational Mechanisms with the development of theoretical analysis of policy instruments based on the theory of Tatang A. Taufik. Policy Instruments are tools used by the government to achieve policy goals or targets. The method used in this research is descriptive qualitative by providing objectively accurate images or explanations related to the actual situation of the object under study. The results of this research show that the instruments used by the Sidoarjo Regency Government are effective and working well even though there are still obstacles in implementing stunting reduction in Sidoarjo or are still not optimal. This success is proven by the reduction in the prevalence of stunting in Sidoarjo Regency. This reduction is the result of

collaborative efforts across sectors and the role of villages or district to sub-district TPPS. The development of instruments for handling stunting in Sidoarjo is the TPPS and Stunting Locus Villages which change every year. The obstacles in reducing the stunting rate in Sidoarjo, namely the lack of budget in determining stunting locus villages, the low level of knowledge and the lack of cadres regarding the issue and handling of stunting, the human resources available at community health centers, the low awareness of the importance of blood-boosting tablets for young women and pregnant women. , still underestimate the issue of sanitation and do not prioritize the construction of latrines and the accuracy and completeness of data obtained from Posyandu. The suggestions from this research are to strengthen coordination between programs at community health centers, increase the commitment and seriousness of all parties through socialization and advocacy for the stunting program, intensify educational campaigns and outreach to the community, improve the data collection and reporting system at Posyandu to ensure accurate and complete data.

Keywords ; Instrument Development, Stunting, Sidoarjo Regent Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menjelaskan instrument yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sesuai Perbup No 89 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas dan mengidentifikasi 3 Indikator, yaitu Piranti Hukum, Tatanan Kelembagaan dan Mekanisme Operasional dengan pengembangan analisa teori instrumen kebijakan berdasarkan teori dari Tatang A. Taufik. Instrument Kebijakan adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberikan gambar atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah efektif dan berjalan dengan baik walaupun masih

ada kendala dalam pelaksanaan penurunan stunting di Sidoarjo atau masih belum optimal. Keberhasilan itu dibuktikan dengan menurunnya prevalensi angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya kolaborasi lintas sektor dan peran desa atau TPPS kabupaten hingga kelurahan. Pengembangan instrumen dalam penanganan stunting di Sidoarjo ialah TTPS dan Desa Lokus Stunting tiap tahunnya berganti. Adapun kendala dalam penurunan angka stunting di Sidoarjo, yaitu kurangnya anggaran dalam penetapan desa lokus stunting, masih rendahnya pengetahuan dan rendahnya kader tentang isu dan penanganan stunting, sumber daya manusia yang ada di puskesmas, rendahnya kesadaran pentingnya tablet penambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, masih menganggap remeh masalah sanitasi dan kurang mengutamakan pembangunan jamban serta Keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh dari Posyandu. Saran dari penelitian ini adalah Memperkuat koordinasi antar program di puskesmas, Meningkatkan komitmen dan keseriusan semua pihak melalui sosialisasi dan advokasi program stunting, Gencarkan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan di Posyandu untuk memastikan data yang akurat dan lengkap.

Kata Kunci ; Pengembangan Instruman, Stunting, Peraturan Bupati Sidoarjo

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang pendek dan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit. Status gizi balita digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Untuk memantau status gizi balita, dilakukan pengukuran usia, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Menurut Dinas Kesehatan, Balita yang mengalami stunting akan menunjukkan hasil pemeriksaan antropometri di mana tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usia mereka. (Laili et al., 2022). Standar tinggi badan anak tersedia dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta dokumen terkait lainnya. Stunting, atau kondisi tubuh pendek pada anak, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, sehingga menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari seharusnya sesuai usianya. (Ramayulis, dkk dalam Arnita et al., 2020).

Kesehatan anak merupakan indikator penting bagi suatu bangsa dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus. Oleh karena itu, pemantauan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak sangatlah krusial. Dalam konteks ini, peran ibu sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan gizi, terutama terkait asupan gizi keluarga. (Devi et al., 2023). Pada pertengahan periode tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), dunia menghadapi kekhawatiran karena berada di luar jalur untuk mencapai target global mengenai stunting. Secara global, tingkat pengurangan rata-rata tahunan (AARR) untuk stunting berdasarkan tren saat ini dari tahun 2012 hingga 2022 hanya mencapai 1,65 persen per tahun. Namun, untuk mencapai target global dalam mengurangi jumlah anak yang mengalami stunting menjadi 88,9 juta pada tahun 2030, diperlukan AARR sebesar 6,08 persen dari sekarang hingga 2030. Tingkat pengurangan ini hampir empat kali lebih tinggi dari yang telah dicapai dalam dekade terakhir.

Masalah stunting pada masa awal kehidupan, terutama selama periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), berpotensi berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menghambat pertumbuhan dan perkembangan optimal organ tubuh. Balita yang mengalami stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita global dan menyebabkan hilangnya 55 juta Disability-Adjusted Life Years (DALYs) setiap tahun.(Sarwono, 2010).

- a) **Dalam jangka pendek**, stunting menyebabkan gagal pertumbuhan, hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik, serta ukuran fisik tubuh yang tidak optimal dan gangguan metabolisme.
- b) **Dalam jangka panjang**, stunting mengakibatkan penurunan kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak yang bersifat permanen berdampak pada kemampuan belajar di usia sekolah, yang nantinya dapat mempengaruhi produktivitas saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke.

Sedangkan penyebab stunting banyak faktornya. Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status Kesehatan (Sarwono, 2010). Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu

1. Faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan)
2. Lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan)
3. Akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan)
4. Kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).

Adapun Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup:

- 1) Komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan
- 2) Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor
- 3) Kapasitas untuk melaksanakan

Salah satu faktor krusial yang mempengaruhi status gizi anak balita adalah pengetahuan ibu mengenai gizi. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai variasi bahan makanan dan jenis makanan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam hal perkembangan otak. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk memberikan makanan bergizi kepada anak mereka. Pengetahuan ini erat kaitannya dengan tingkat pendidikan; seseorang yang memiliki pendidikan tinggi umumnya memiliki pengetahuan yang lebih luas. Tingkat pengetahuan ibu memainkan peran penting dalam manajemen rumah tangga, termasuk dalam pemilihan bahan makanan untuk keluarga, yang akan memengaruhi pola pemikiran mereka dalam memilih makanan. Orang tua memiliki peran sentral dalam memastikan kecukupan gizi anak balita, yang masih memerlukan perhatian khusus dalam proses perkembangannya, di mana peran seorang ibu sangat signifikan. Seorang ibu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang gizi diharapkan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak mereka.

Gizi merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan kemajuan bangsa. Salah satu masalah gizi yang signifikan dan

menjadi perhatian global adalah stunting pada anak balita. Status gizi anak balita mencerminkan sejauh mana kebutuhan gizi mereka terpenuhi, yang menjadi indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan antropometri atau pengukuran bagian-bagian tubuh tertentu. Indikator yang umum digunakan meliputi Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan

Pemerintah menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Targetnya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Komitmen ini diwujudkan dengan memasukkan isu stunting ke dalam RPJMN 2020-2024. Target penurunan stunting cukup signifikan, yaitu dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024. Presiden menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. BKKBN kemudian mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). RAN PASTI merupakan perencanaan aksi dalam penanganan stunting yang akan dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah dengan tingkat stunting yang tinggi pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 14,8% pada tahun 2021 menjadi 16,1% pada tahun 2022. Bupati Sidoarjo mengeluarkan regulasi dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Diikuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo No 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Peraturan ini menegaskan peran penting pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Untuk memaksimalkan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo, didirikan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo. Penurunan stunting di daerah ini melibatkan sektor-sektor berbeda melalui koordinasi program lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,4 persen. Keberhasilan ini dicapai berkat kolaborasi lintas sektor di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali. Menurut data dari aplikasi e-PPGBM, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Februari 2023 adalah 5,3 persen, yang kemudian turun menjadi 3,4 persen pada bulan Agustus 2023. Gus Muhdlor menjelaskan bahwa penurunan ini berkat kerjasama yang baik antara Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, forum Rumah Desa Sehat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah Sidoarjo telah mengambil langkah serius untuk mengatasi stunting dengan menerapkan kebijakan yang fokus pada penyelesaian masalah ini. Kebijakan ini merupakan hasil dari proses yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. Untuk menjalankan kebijakan ini secara efektif, diperlukan instrumen kebijakan yang terstruktur, yaitu serangkaian langkah atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan analisis instrumen kebijakan penanganan stunting di tingkat kabupaten dengan menggunakan teori instrumen kebijakan menurut Tatang A. Taufik (2005), Maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ Pengembangan Instrumen Kebijakan Penanganan Stunting Sesuai Perbup Nomor 89 Tahun 2021 di Sidoarjo”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Puskesmas dan Kelurahan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yaitu: (1) Reduksi data (*data reduction*), (2) Penyajian data (*data display*), dan (3) Penarikan kesimpulan (*conclusions*).

Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis Perkembangan Instrumen Kebijakan Penanganan Stunting Sesuai Perbup No 89 Tahun 2021 di Sidoarjo. Pengembangan Instrumen Kebijakan ini sendiri ialah suatu alat yang di kembangkan oleh pemerintah dalam penanganan stunting bisa seperti inovasi berupa aplikasi atau program yang telah di terapkan lalu dikembangkan sesuai dengan yang ingin dicapai. Dengan begitu penulis menggunakan pendekatan instrumen kebijakan teori (Tatang A. Taufik, 2005) yang mengatakan ada 3 indikator instrumen kebijakan :

a. Piranti Hukum

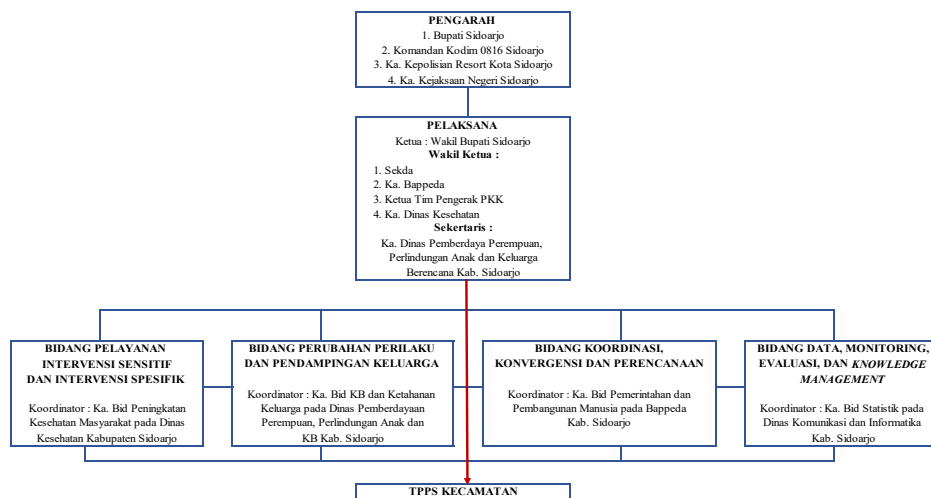
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas mengenai akan menyampaikan data tentang piranti hukum pencegahan stunting di Sidoarjo. Dengan adanya kenaikan angka stunting di Sidoarjo pada tahun 2022, Pemerintah kabupaten Sidoarjo dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam Percepatan penurunan Angka Stunting wilayah ini. Dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas yang diikuti dengan Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Terintegritas. Peraturan ini mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif desa-desa dalam upaya penurunan stunting. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, sektor swasta dan desa dalam penanganan stunting di Sidoarjo. Selain itu, membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kabupaten hingga Desa. Ini menunjukkan upaya koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah stunting.

Program-program yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (RAN-PASTI) 2021-2024, dengan target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14%. Dalam Perbup Sidoarjo No 89 Tahun 2021 berfokus pada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Adapun Program – program dalam percepatan penurunan angka stunting. Program ini sasaran dan indikator target mengacu pada RPJMN. Program-program percepatan penurunan stunting yang telah diinisiasi oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo, seperti melalui Peraturan Bupati terkait, telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait hingga ke level desa. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, dalam pelaksanaan program-program di tingkat puskesmas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang baik dan pemahaman tentang bahaya stunting. Ini menjadi hambatan dalam upaya mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah penetapan desa lokus stunting setiap tahunnya. Desa lokus stunting merupakan desa atau wilayah yang menjadi fokus utama dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting. Penetapan desa lokus stunting di Sidoarjo didasarkan pada data yang tercantum dalam SK 188/295/438/1.1.3/2023. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus melakukan prioritisasi dalam menetapkan desa-desa yang akan menjadi fokus intervensi stunting. Terlepas dari itu, Peraturan Bupati Sidoarjo No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas menunjukkan hasil yang memuaskan. Dilandasi kerjasama dan komitmen kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, angka stunting di Sidoarjo menunjukkan tren penurunan pada tahun 2023. Meskipun tren penurunan terlihat, angka stunting di Sidoarjo masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan. Pengembangan instrument kebijakan yang di pakai oleh pemerintah kabupaten sidoarjo adalah TPPS turunan dan penetapan desa lokus stunting yang tiap tahunnya berbeda serta ada inovasi berupa aplikasi “KOPI PAHIT” yang sudah disebarakan di puskesmas untuk membantu mendeteksi stunting tetapi akan ada evaluasi lebih lanjut oleh dinas Kesehatan

b. Tataan Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat diketahui bahwa Aturan kelembagaan mengatur keberadaan, fungsi, dan hubungan antara berbagai lembaga di suatu negara. Salah satu tujuan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa semua lembaga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemkab Sidoarjo mengeluarkan SK TPPS Sidoarjo 2024 dalam upaya menurunkan angka stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting adalah sarana penting untuk mengubah tujuan pengurangan stunting nasional menjadi strategi yang dapat diterapkan dan mencapai hasil nyata di tingkat lokal. TPPS memainkan peran penting dalam mempercepat pengurangan stunting dengan menyatukan para pemangku kepentingan, membangun kerja sama, dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat penurunan stunting, gunakan pendekatan umum untuk meningkatkan komitmen dan peran pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan mitra kerja. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang solid antara TPPS di berbagai tingkatan, Forum Rumah Desa Sehat (RDS), dan para pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan TPPS Sidoarjo dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan, dari 16,1% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023. Tetapi angka rata-ratanya masih tinggi, yakni sebesar 21,5 persen. Maka diharapkan Pemkab Sidoarjo terus gencarkan komitmen antar sektor atau pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting dan rata-rata di wilayah sidoarjo. Berikut merupakan TPPS Sidoarjo 2023 sesuai SK Nomor 188/377/438.1.1.3./2023



Gambar TPPS Kab Sidoarjo 2023

Sumber : SK Nomor 188/377/438.1.1.3./2023

c. Mekanisme Operasional

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme operasional dibagi menjadi 3, yaitu

1. Pertemuan Rutin

- a) Minilok Bulanan, diadakan 1 bulan sekali dengan melibatkan internal puskesmas saja. Dalam pertemuan ini membahas tentang evaluasi program – program yang telah dilaksanakan. Hambatan dari pertemuan ini adalah kurangnya koordinasi antar program
- b) Minilok Linsek, diadakan 3 bulan sekali yang melibatkan berbagai sektor lain. Dalam pertemuan ini untuk membahas dan merumuskan strategi bersama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hambatan di pertemuan ini adalah pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu kurangnya komitmen dan keseriusan beberapa pihak untuk menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan kurangnya komitmen dan keseriusan.
- c) Rembug Stunting, diadakan 1 bulan sekali. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas hasil rumusan kegiatan melalui diskusi yang terarah. Tujuannya adalah untuk membangun komitmen Desa serta menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam upaya penanganan stunting. Hal ini selaras dengan peran desa dalam percepatan penurunan stunting yang tertuang di Peraturan Bupati No 90 tahun 2021 pasal 30 poin 3, yaitu rembug stunting berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hambatan dalam pertemuan ini adalah kurangnya pemahaman beberapa kader desa tentang isu stunting, serta kurangnya komitmen dalam menghadiri pertemuan rembug stunting.

- d) Pembinaan Kader, diadakan 1 bulan sekali. Pembinaan kader atau kelompok kegiatan merupakan pertemuan rutin yang diadakan oleh Penyuluh terkait dan diikuti oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta kader. Pembinaan kader merupakan salah satu program penting yang dilakukan oleh puskesmas untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kader kesehatan di tingkat desa/kelurahan. Hambatan dalam pembinaan kader adalah kurangnya pengetahuan kader tentang isu dan penanganan stunting dan kurang aktifnya kader dalam ikut serta pembinaan ini.

2. Pelaksanaan Program

- a) Program Kelas Ibu Hamil, Program Kelas Ibu Hamil (KIH) disajikan sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai gaya hidup sehat. Program ini diadakan secara bulanan dengan berbagai materi pendidikan, serta menggunakan buku KIA sebagai sumber informasi utama. Dalam penerapannya, puskesmas dan kader posyandu aktif menyampaikan materi edukasi yang komprehensif, mencakup topik seperti kesehatan ibu hamil, perubahan fisik selama kehamilan, nutrisi yang tepat, serta panduan menyusui dan pemberian MP-ASI. Namun, program ini menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat. Minat dan antusiasme untuk mengikuti sosialisasi menjadi hambatan utama yang harus diatasi.
- b) Pemberian Makanan Tambahan, Pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan salah satu intervensi penting dalam program pendampingan keluarga berisiko stunting. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai status gizi yang optimal. PMT yang diberikan puskesmas adalah dengan memberikan makanan siap saji susu, dan biskuit. pemberian itu merupakan program dari dinas kesehatan dalam pemberian makanan tambahan, puskesmas juga melakukan sosialisasi dengan kader kader dan masyarakat edukasi tentang cara pengolahan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan balita. Namun, kendala dalam sosialisasi ini adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya kesehatan dan gizi. Sedangkan PMT yang diadakan oleh kader kesehatan yang ada di desa, pemberiannya secara rutin setiap bulan di Posyandu dengan program pos gizi. Menu yang disajikan pada kegiatan PMT setiap bulannya cukup beragam dan bergizi, biasanya diproduksi atau dibuat sesuai dengan ketersediaan bahan, Tidak hanya memberikan makanan tambahan kepada balita yang mengalami stunting, tetapi juga melibatkan mereka dalam bermain dan bernyanyi agar mereka tidak merasa jenuh selama kegiatan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting, khususnya di Pasal 21, yaitu Pemerintah Desa harus mendukung partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program atau kegiatan pembangunan desa, terutama terkait layanan gizi khusus. Meskipun pemerintah desa sudah melakukan PMT tetap masih ada kendalanya, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PMT pada anak.



- c) Pemberian Tablet Penambah Darah untuk remaja. Pemberian Tablet Penambah Darah (TTD) untuk remaja putri merupakan program penting dalam upaya pencegahan anemia dan stunting. Program merupakan sasaran dari program intervensi gizi yang termuat di Peraturan Bupati Sidoarjo No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting terintegritas, pasal 8 poin ke 4, yakni kegiatan intervensi gizi dengan sasaran remaja putri, dengan intervensi pemberian tablet penambah darah. program ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan uks di sekolah. Namun program ini masih kurang kesadaran remaja tentang anemia dan manfaat tablet penambah darah
- d) Pemberian Tablet Penambah Darah untuk Ibu Hamil. Pemberian Tablet Penambah Darah (TTD) kepada ibu hamil merupakan salah satu komponen penting dalam layanan pendampingan keluarga risiko stunting. Anemia pada ibu hamil dapat berakibat fatal bagi kesehatan ibu dan janin, seperti meningkatkan risiko kematian ibu, bayi lahir prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Namun, perlu dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah untuk memastikan bahwa tablet tersebut benar-benar dikonsumsi. Program merupakan sasaran dari program intervensi gizi yang termuat di Peraturan Bupati Sidoarjo No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting terintegritas, pasal 8 poin ke 4, yakni kegiatan intervensi gizi dengan sasaran remaja putri, dengan intervensi pemberian tablet penambah darah. program ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan uks di sekolah. Namun program ini masih kurang kesadaran remaja tentang anemia dan manfaat tablet penambah darah.
- e) Peningkatan Akses Pangan Bergizi. Masalah utama yang menyebabkan stunting pada balita di pedesaan masih disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan yang bergizi bagi keluarga. Pemerintahan Desa berperan dalam memfasilitasi pengkoordinasian data keluarga balita stunting yang kurang mampu dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya adalah untuk menyalurkan bantuan sembako yang diperlukan oleh keluarga-keluarga tersebut. Bantuan sembako yang diberikan kepada keluarga balita stunting berupa bahan mentah yang dapat diolah menjadi makanan bergizi untuk dikonsumsi setiap hari.
- f) Peningkatan Sanitasi dan Air Bersih, Peningkatan sanitasi dan air bersih merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas sarana sanitasi bagi masyarakat. Program pembangunan jamban sehat di Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan sanitasi di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih kekurangan akses sanitasi yang memadai. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan instansi terkait, dilakukan untuk membangun jamban sehat bagi warga yang kurang mampu. Kabupaten Sidoarjo yang sudah mencapai status Open Defecation Free (ODF). Namun ada hambatan dari program ini, yaitu masyarakat masih menganggap remeh

masalah sanitasi dan kurang mengutamakan pembangunan jamban di rumah mereka.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan aktivitas mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Pelaksanaan lapangan untuk menghasilkan Satu Data Percepatan Penurunan Stunting yang up to date, real time dan reguler/rutin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo no 89 tahun 2021, pasal 25 poin ke 1, yaitu pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Untuk Dinas Kesehatan, sebagai pemantauan data dan Puskesmas dalam penginputan data menggunakan aplikasi E-PPGBM. sedangkan Posyandu atau tingkat Desa menggunakan ASP dan untuk Bappeda sendiri lewat aksi bangda. Aksi Bangda merupakan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan data untuk mendukung perencanaan pembangunan di tingkat daerah. sedangkan Aplikasi ePGBBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) adalah sistem yang digunakan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan status gizi di masyarakat secara elektronik sedangkan di Desa menggunakan ASP. Dalam penginputan data, tantangan dalam hal keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh dari Posyandu.

Pemetaan dalam Kebijakan Penurunan Stunting

Peraturan Bupati Sidoarjo No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas dan Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting



- 1) Bupati Sidoarjo
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4) Dinas Sosial
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Dinas Pendidikan
- 7) Dinas Ketahanan Pangan
- 8) Puskesmas
- 9) LSM dan Organisasi Masyarakat

Sasaran untuk intervensi gizi spesifik meliputi:

- a) ibu hamil;
- b) ibu bersalin, ibu menyusui, dan anak di bawah usia 6 bulan;
- c) ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan, yakni anak usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan kurang 1 hari; dan
- d) remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan, yakni anak balita usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan (usia 60 bulan kurang 1 hari).

Sasaran untuk intervensi gizi sensitif, yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga kelompok 1.000 HPK.

```
graph TD; A[Sasaran untuk intervensi gizi spesifik meliputi:  
a) ibu hamil;  
b) ibu bersalin, ibu menyusui, dan anak di bawah usia 6 bulan;  
c) ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 bulan, yakni anak usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan kurang 1 hari; dan  
d) remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan, yakni anak balita usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan (usia 60 bulan kurang 1 hari).  
  
Sasaran untuk intervensi gizi sensitif, yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga kelompok 1.000 HPK.] --> B[Percepatan penurunan Angka Stunting di Sidoarjo dengan sasaran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif];
```

Percepatan penurunan
Angka Stunting di Sidoarjo
dengan sasaran Intervensi
Gizi Spesifik dan Sensitif

Kesimpulan

Dengan meningkatnya angka prevalensi stunting pada tahun 2022 di Sidoarjo, Bupati Sidoarjo mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati No 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kebijakan ini berfokus pada Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif. Selain itu, Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan Stunting Terintegrasi juga diterbitkan. Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai sektor. Kebijakan ini berhasil, terbukti dari penurunan prevalensi stunting dari 16,1% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023. Keberhasilan ini berkat sinergi antara TPPS, Forum Rumah Desa Sehat (RDS), dan pemangku kepentingan lainnya. Instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah kabupaten Sidoarjo adalah dengan meningkatkan kerjasama antarsektor, pemangku kepentingan dan melibatkan peran desa, yaitu dengan membentuk TPPS tingkat kabupaten hingga kelurahan, selain itu, pemerintah kabupaten Sidoarjo tiap tahunnya menetapkan desa lokus stunting sebagai upaya penurunan angka stunting di Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga mengeluarkan inovasi aplikasi "Kopi Pahit" oleh Puskesmas Porong, yang telah diadopsi oleh semua Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini masih di evaluasi lebih lanjut untuk pengembangan yang lebih memudahkan pemantauan status balita stunting dan membuat intervensi lebih spesifik. Meski kebijakan ini efektif, beberapa indikator seperti piranti hukum, kelembagaan, dan mekanisme masih memerlukan perbaikan untuk menjaga penurunan prevalensi stunting.

1. Kesimpulan ini berdasarkan atas data dan fenomena yang terjadi yang diperoleh penganalisis melalui akumulasi data, informasi dan turun lapangan langsung di Bappeda, Dinkes Sidoarjo, Dp3akb, 6 Puskesmas dan 5

Kelurahan. Bersumber pada hasil penelitian data diatas mengenai Pengembangan Instrumen Kebijakan Penanganan Stunting Sesuai Perbup No 89 Tahun 2021 Di Sidoarjo, dapat disimpulkan sebagai berikut :

2. Indikator Piranti Hukum: Kebijakan Bupati Sidoarjo berhasil menurunkan angka stunting, namun, angka rata – rata masih tinggi. Masih ada kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas dan kurangnya kesadaran kader tenaga kesehatan dan penanganan stunting, dan penetapan desa lokus stunting terbatas oleh anggaran dan pengetahuan kader dalam menentukan desa lokus
3. Indikator Kelembagaan: Meskipun TPPS berjalan lancar dan optimal, rata-rata angka stunting masih tinggi. Perlu penguatan pendekatan terintegrasi dengan melibatkan sektor lain dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penurunan stunting dilakukan secara efektif, dan berkelanjutan.
4. Indikator Mekanisme Operasional: Mekanisme operasional sebagian besar berjalan baik dan pemerintah desa yang ada di Sidoarjo juga telah melakukan program – program yang telah ditetapkan oleh Pemkab Sidoarjo, tetapi masih ada kendala didalamnya dan perlu peningkatan karena angka rata-rata stunting masih tinggi, seperti kurangnya koordinasi antar program di puskesmas, kurangnya komitmen dan keseriusan beberapa pihak dalam mengikuti program, Kurangnya pemahaman kader desa tentang isu stunting, Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program pencegahan stunting, masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya kesehatan dan gizi, kurangnya kesadaran remaja tentang anemia dan manfaat tablet penambah darah, Masyarakat masih menganggap remeh masalah sanitasi dan kurang mengutamakan pembangunan jamban serta Keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh dari Posyandu

Saran

Setelah melakukan proses penelitian data diatas dengan terjun lapangan secara langsung, peneliti mengupayakan saran dan kritikan sebagai sebuah jalan keluar nantinya yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam percepatan penanganan stunting sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antar program di puskesmas melalui rapat koordinasi dan mekanisme komunikasi yang efektif.
2. Meningkatkan komitmen dan keseriusan semua pihak melalui sosialisasi dan advokasi program stunting.
3. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya program pencegahan stunting melalui berbagai media.
4. Meningkatkan edukasi tentang pentingnya kesehatan dan gizi, termasuk pola makan sehat dan bergizi seimbang.
5. Meningkatkan edukasi tentang pentingnya pencegahan anemia dan manfaat tablet penambah darah untuk remaja dan ibu hamil
6. Meningkatkan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik dan mendorong pembangunan jamban di masyarakat.
7. Meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan di Posyandu untuk memastikan data yang akurat dan lengkap.

Daftar Pustaka

- Adriana. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie. *Jurnal Ilmu EkonIlmu, S., Negara, A., Ilmu, S., & Negara, A. (n.d.). Dewanti Septianingrum Tauran, S. Sos., M. Soc., Sc. 12040674015, 1–11. Omi Dan Sosial, 1(2), 1–21.* <https://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3365>
- Agustino, L. (2006). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Arnita, S., Rahmadhani, D. Y., & Sari, M. T. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi, 9(1), 7.* <https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.149>
- Athifah, Z., & Amelia, A. R. (2023). Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2023. *Journal of Health, Education and Literacy, 6(1), 17–26.* <https://doi.org/10.31605/j-healt.v6i1.2824>
- Bakari, L., Antu, Y., Katili, A. Y., Bina, U., & Gorontalo, T. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMADIRIAN KESEHATAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 10, 1219–1232.*
- Bancin, Y. (2024). *Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. 01(01), 18–27.*
- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam, 1(2), 45–50.*
- Buulolo, J., Santoso, H., Bancin, D., Manurung, K., Manurung, J., & Sitorus, M. E. J. (2023). Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk Pada Balita Studi Kualitatif di Puskesmas Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. *Jurnal Ners, 7(2), 917–931.* <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16652>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83.* <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Devi, E. O., Suluh, D., Dewi, K., & Dj, E. W. (2023). Policy Trend of Stunting Treatment in Developing Countries at Southeast Asia (WHO's Role in Achieving Global Targets) Tren Kebijakan Penanganan Stunting di Negara-Negara Berkembang di Asia Tenggara (Peran WHO untuk Mencapai Target Global). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(01), 124–135.* <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.444>
- Fadilah, F., Darmawansyah, D., & Seweng, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Terhadap Jumlah Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim, 2(1).* <https://doi.org/10.30597/jkmm.v2i1.10022>
- Febrian F, & Yusran R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(1), 11–21.*
- Feny Rita Fiantika et all. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Gati, R. A. (2016). Keefektifan Instrumen Kebijakan Pelayanan Perizinan di Kota Surabaya (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
https://repository.unair.ac.id/68308/3/JURNAL_071514353001.pdf
- Hadi, S. P. I., & Tri Budi Rahayu. (2022). Pengembangan Aplikasi Sahabat Bunda | Cegah Stunting Berbasis Android Sebagai Upaya Pencegahan Dini Stunting. *Embrio*, 14(1), 84–96. <https://doi.org/10.36456/embrio.v14i1.4503>
- Humaeroh, L., & Hidayani. (2018). Pengembangan Kebijakan Operasional Pemanfaatan Program Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). *Health Science Growth (HSG) Journal*, 3(2), 81–100.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Kurniawan, F. (2019). Lejong Tau, A Diorama of Conflict Resolution Based on Local Wisdom. *Jurnal Partisipatoris*, 1(1), 28–35.
- Kurniawan, F. (2020). *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Vol. 3). G4 Publishing.
- Kurniawan, F. (2022). Stunting dan Stigma Masyarakat, Studi Etnografis Penanganan Stunting pada Masyarakat Kabupaten Malang. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(4), 56–68.
- Kurniawan, F. (2024). STUNTING, COVID-19, DAN LOCAL KNOWLEDGE STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ARJOWINANGUN KOTA MALANG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 21–30.
- Kurniawan, F., & Kusumaningtyas, Y. (2022). Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Socia Logica*, 1(1), 42–52.
- Kurniawan, F., & Parella, K. A. (2018). Sociopreneurship masyarakat gusuran dalam membangun konsep kampung wisata tematik topeng malangan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(2), 35–48.
- Kurniawan, F., & Soenaryo, S. F. (2019). Menaksir kesetaraan gender dalam profesi ojek online perempuan di kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 4(2).
- Laili, U., Budi Permana Putri, E., & Khusnul Rizki, L. (2022). The Role of Family Companions in Reducing Stunting. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 120–126. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.120-126>
- Madiuw, D., Manuhutu, F., Sainafat, A., Rehena, Z., Leutualy, V., Tasijawa, F. A., Tomaso, V. Y., Sopacua, D. T., Herwawan, J. H., & Huwae, A. (2023). SIDIK SIAMA: An instrument for Risk Detection of Stunting Since Pregnancy. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 383–390. <https://doi.org/10.30604/jika.v8i1.1618>
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>
- Maryanah, Supredewi, I., & Jomima Batlajery. (2022). Pengembangan Instrumen Deteksi Faktor Risiko Stunting. 88–93.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Purwasih, J. H. G., Meiji, N. H. P., Kurniawan, F., Dharmawan, A. S., & Sugiharto, M. A. (2021). Penguatan Konservasi dan Literasi Kelompok Grassroot di Kota Batu. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 58–63.

- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.
- Rahmanda, F., Pramita, F., Fakultas, G., Masyarakat, K., & Masyarakat, I. K. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati*.
- Rahmuniyati, M. E., & Sahayati, S. (2021). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 80–95. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1235>
- Rismawan, M., Sriasih, N. K., Putra, I. B. A., & Indriana, N. P. R. K. (2023). Pengembangan Instrumen Smart Parenting Pada Anak Usia 0-3 Tahun. *Jurnal Gema Keperawatan*, 16(1), 72–87.
- Saffanah, W. M., & Kurniawan, F. (2020). Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang dengan Menjadi Buruh Bangunan. *ARISTO*, 9(1), 109-130.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1983>
- Sarwono. (2010). *Buku Panduan*.
- Setiawan, H., & Kurniawan, F. (2017). Pengobatan tradisional sebuah kajian interaksionisme simbolik. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 23(2), 57-66.
- Shauma, at all. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Susanti, W. I., Widodo, A. P., & Nugraheni, S. A. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Status Gizi Balita Stunting di Kelurahan Gajah Mungkur. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 7(1), 67–74. <https://doi.org/10.14710/jmki.7.1.2019.67-74>
- Susilo, R. K. D., Dharmawan, A. S., & Kurniawan, F. (2021). Accept or against the change: The adaptation of the lor brantas society towards the development of Batu City. *Folia Geographica*, 63(1), 143.
- Tatang A. Taufik. (2005). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan. In *Jakarta: BPPT (Issue April)*.
- Yusuf, O., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2022). Implementasi Program Jamban Sehat Puskesmas Mojolangu Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tasikmadu (Studi Kasus di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). 16(1), 10–15.